



PENDIDIKAN KARAKTER PANGCASILA



Arif Sobirin Wibowo
Ida Bagus Weda Wigena
Medi Hermanto Tinambunan
I Gede Budi Mahendra

PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

Arif Sobirin Wibowo
Ida Bagus Weda Wigena
Medi Hermanto Tinambunan
I Gede Budi Mahendra



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

Penulis:

Arif Sobirin Wibowo
Ida Bagus Weda Wigena
Medi Hermanto Tinambunan
I Gede Budi Mahendra

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,65,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-526-8

Cetakan Pertama:

September 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab berkat kasih dan anugerah-Nya, buku ini dengan judul Pendidikan Karakter Pancasila dapat diselesaikan. Pendidikan karakter merupakan pembelajaran tentang karakter yang baik dan sesuai amanah undang-undang dasar serta pancasila yang menjadi pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Penulisan buku ini bertujuan untuk memperkaya khasanah keilmuan terutama tentang pendidikan karakter. Namun demikian, penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan-kekurangan, maka dari itu segala kritikan dan saran, sangat diharapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya, dan tentunya disampaikan terima kasih. Akhirnya penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan sehingga Buku ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA	1
A. Sejarah dan Filosofi Pancasila	1
B. Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Berbangsa	5
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Karakter Pancasila	9
D. Metode dan Pendekatan dalam Pendidikan Karakter	12
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER	18
A. Ketuhanan Yang Maha Esa	18
B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	20
C. Persatuan Indonesia	23
D. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	26
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	28
BAB 3 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DI LEMBAGA PENDIDIKAN	32
A. Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Pancasila	32
B. Peran Sekolah dalam Membentuk Karakter Pancasila	35
C. Pendidikan Karakter Pancasila Berbasis Masyarakat	37
D. Tantangan dan Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Pancasila	39
BAB 4 KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA	43
A. Desain Kurikulum Pendidikan Karakter Pancasila	43
B. Pendekatan dan Metode Pembelajaran dalam Kurikulum Karakter	45
C. Evaluasi Pendidikan Karakter Pancasila	47
D. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter	51

BAB 5 TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DI MASA DEPAN	53
A. Tantangan Global dalam Pendidikan Karakter Pancasila	53
B. Inovasi Teknologi dan Pendidikan Karakter	55
C. Prospek dan Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Karakter Pancasila.....	57
D. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Karakter Pancasila	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

A. SEJARAH DAN FILOSOFI PANCASILA

Pancasila harus dipahami secara kronologis dalam kedudukannya dan fungsinya. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila, termasuk dalam aspek rumusan dan terminologinya, pemahaman tersebut dapat diperluas melalui beberapa cakupan konseptual berikut: Pengertian Pancasila secara etimologis: Pancasila, secara etimologis, memiliki akar dari bahasa Sansekerta yang berasal dari India (bahasa kasta Brahmana), dan juga dalam bahasa rakyat biasa yang dikenal sebagai bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta, kata "Pancasila" memiliki dua makna leksikal, yakni "panca" yang berarti "lima" dan "syila" atau "syiila" yang secara vokal memiliki arti "batu sendi", "alas", atau "dasar", serta "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh". Dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, istilah ini diartikan sebagai "susila" yang memiliki keterkaitan dengan moralitas. Jadi, secara etimologis, "Pancasila" merujuk pada istilah "Panca Syilla" dengan vokal i pendek, yang mengandung makna leksikal "dasar yang memiliki lima unsur" atau secara harfiah "dasar yang terdiri dari lima unsur". Sedangkan istilah "Panca Syiila" dengan huruf Dewanagari i merujuk pada 5 aturan tingkah laku yang penting.

Pengertian. Pancasila secara Historis: Proses pembentukan Pancasila dimulai pada sidang pertama BPUPKI ketika dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan masalah mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Ketika itu, tiga pembicara, yaitu

Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, turut hadir dalam sidang tersebut. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno memberikan pidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Nama "Pancasila" diberikan oleh Soekarno atas saran dari seorang teman yang merupakan ahli bahasa, namun tidak disebutkan namanya. "Pancasila" yang artinya lima dasar, dipilih sebagai nama tersebut.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian Pancasila secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.

Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Dari perspektif filosofis dan objektif, nilai-nilai yang diungkapkan dalam sila-sila Pancasila mencerminkan filsafat bangsa Indonesia sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Sebelum negara Indonesia berdiri, bangsa Indonesia diakui sebagai bangsa yang beragama, memiliki prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tekun mempertahankan persatuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, ada tanggung jawab moral untuk menerapkan nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara, harus menjadi pijakan bagi segala tindakan yang diambil oleh para pemimpin negara dan harus menjadi inti dari segala undang-undang yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ketika menghadapi tantangan dari era globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada nilai-nilai ini, Pancasila harus tetap menjadi sumber nilai dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang menggerakkan pembangunan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, serta dalam pertahanan dan keamanan. Untuk bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah dasar filosofis yang mengikat dalam menjalani kehidupan bersama.

Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstiusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstiusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun

empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (2) Memajukan (*meningkatkan*) kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bilamana kita rinci secara sistematis kedudukan Pancasila sebagai dasar kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan Pancasila. Unsur-unsur ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV. Susunan tersebut menunjukkan, bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerohanian negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.
2. Di atas basis (*dasar*) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (*kenegaraan*) yaitu berupa republik yang berupa kedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia.
4. Selanjutnya di atas Undang-undang dasar (*yaitu sebagai basis*) maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan.
5. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniyah.

B. PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKAN MORAL BERBANGSA

Wiyani (2013: 25) mengungkapkan bahwa karakter merujuk pada kualitas atau kekuatan mental dan moral, serta budi pekerti individu yang membedakannya dari individu lain. Karakter ini mencakup watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian yang menunjukkan kualitas moral individu dan menjadi pendorong serta membedakannya dari orang lain. Karakter ini terbentuk dari internalisasi berbagai kebajikan yang menjadi dasar bagi cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Oleh karena itu, pendidikan karakter penting untuk ditanamkan dalam proses pembelajaran di sekolah guna menciptakan manusia yang berkualitas dan siap bersaing dalam masyarakat. Moral memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Namun, seringkali manusia masih terjerumus dalam perilaku yang tidak baik seperti tawuran dan konflik antar sesama. Oleh karena itu, belajar agama dengan tekun dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari serta mengambil inspirasi moral dari ajaran agama menjadi langkah yang penting untuk memperbaiki arah kehidupan menuju kebaikan yang lebih terarah.

Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum (2010: 6), untuk memperkuat pendidikan karakter di institusi pendidikan, telah diidentifikasi 18 nilai yang berasal dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional. Nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek seperti religiusitas, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, penghargaan terhadap prestasi, kemampuan bersosialisasi, perdamaian, kegemaran membaca, kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab. Sekolah bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada siswa melalui kegiatan baik di dalam maupun di luar kurikulum, agar siswa dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik pada siswa, sebagai modal dalam berinteraksi dalam masyarakat.

Pendidikan karakter yang efektif melibatkan tiga aspek utama: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Proses ini mencakup pengetahuan akan prinsip-prinsip moral, pengembangan perasaan yang positif terhadap nilai-nilai tersebut, dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Mulanya, siswa belajar tentang nilai-nilai ini secara kognitif. Selanjutnya, penting bagi mereka untuk mengembangkan perasaan positif terhadap nilai-nilai tersebut, sehingga mereka memiliki kecenderungan alami untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya perilaku yang baik muncul dari rasa cinta terhadap nilai-nilai tersebut. Praktik yang konsisten dari perilaku yang baik kemudian membentuk kebiasaan yang positif. Sebagai contoh, melalui pengajaran nilai-nilai cinta tanah air sejak usia dini, siswa akan membentuk sikap yang mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air, seperti mendukung produk dalam negeri dan melestarikan kebudayaan lokal. Karena pentingnya karakter dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah harus dilakukan secara efektif dan konsisten.

Menurut Wiyani (2013: 48-49), terdapat sembilan karakter dasar yang ditetapkan oleh Heritage Foundation sebagai tujuan dari pendidikan karakter, yaitu: (1) Keberadaan Allah dan alam semesta serta isinya yang dipenuhi cinta, (2) Bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki kemandirian, (3) Kehormatan, kejujuran, (4) Sikap hormat dan berbudi pekerti baik, (5) Kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama, (6) Kepercayaan diri, kreativitas, kerja keras, dan tekad yang kuat, (7) Keadilan dan kemampuan memimpin, (8) Kebaikan dan sikap rendah hati, (9) Cinta damai dan semangat persatuan. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya merujuk pada kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga memiliki kepribadian atau karakter yang baik.

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, baik dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun bangsa, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sempurna. Elkind (2004) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah semua tindakan yang dilakukan oleh guru yang memiliki potensi untuk mengubah karakter peserta didik. Guru berperan dalam membentuk kepribadian peserta didik melalui contoh perilaku, cara berbicara atau menyampaikan materi, sikap toleransi, dan berbagai aspek lainnya yang terkait. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi dasar dari budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang merupakan bagian dari karakter pada dasarnya adalah nilai-nilai. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan karakter merupakan sistem untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anggota sekolah yang melibatkan aspek pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai penggunaan sengaja dari semua dimensi kehidupan sekolah untuk mendorong perkembangan karakter yang optimal. Dalam konteks pendidikan karakter di sekolah, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan harus berpartisipasi, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, manajemen mata pelajaran, manajemen sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan fasilitas, pengelolaan keuangan, dan budaya kerja yang dihayati oleh seluruh anggota sekolah dan lingkungan. Selain itu, pendidikan karakter juga berarti bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, setiap anggota sekolah harus menunjukkan karakter yang baik.

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

Pancasila, sebagai landasan konstitusi dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki peran sentral dalam semua aspek pembangunan. Salah satu aspek yang sangat vital dalam pembangunan nasional adalah pembentukan karakter bangsa, yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ada berbagai alasan yang mendasari pentingnya pembentukan karakter bangsa, baik dari segi filosofis, ideologis, normatif, historis, maupun sosiokultural. Dari segi filsafat, pembangunan karakter bangsa menjadi suatu kebutuhan dasar dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan identitas yang kokoh yang akan bertahan. Dari segi ideologis, pembangunan karakter merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi normatif, pembangunan karakter bangsa adalah langkah konkret menuju pencapaian tujuan negara, seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Dari segi sejarah, pembangunan karakter bangsa merupakan bagian integral dari proses pembentukan identitas bangsa yang terus berlangsung sepanjang sejarah. Baik pada masa penjajahan maupun pasca kemerdekaan, pembangunan karakter bangsa dianggap penting. Secara sosiokultural, pembentukan karakter bangsa merupakan kebutuhan bagi bangsa yang beragam budaya. Hal ini merupakan konsep yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa karena Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman suku dan kekayaan lokal yang kental, memerlukan kesatuan dalam budaya dan karakter sebagai bangsa. Keseragaman tersebut sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama, pandangan yang serupa,

dan langkah bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun pembangunan nasional telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup, masih terdapat banyak masalah dan tantangan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu di antaranya adalah pergeseran dalam karakter bangsa yang menjadi perhatian akhir-akhir ini. Karakter nasional adalah sifat yang harus dipertahankan dan diperkuat sehingga menjadi ciri yang diakui oleh seluruh dunia. Perilaku yang semakin tercela, seperti kekerasan di antara pelajar, konflik antarsuku, tindak kejahatan seperti perampokan, serta perilaku yang kejam seperti pelecehan seksual dan pembunuhan, telah menjadi bagian dari pemandangan kita sehari-hari melalui media massa.

Padahal, kita menyadari bahwa Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dikenal sebagai negara yang ramah, damai, dan penuh semangat gotong royong. Namun, realitas yang kita saksikan bertentangan dengan citra ini. Ini merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri bahwa karakter bangsa kita telah terkikis. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi cara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam usaha memperkuat karakter bangsa di kalangan generasi muda. Istilah karakter sering kali dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, ahlak, dan nilai, yang semuanya berkaitan dengan kekuatan moral. Istilah ini memiliki konotasi positif yang jelas, bukan netral. Dalam konteks ini, Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada individu peserta didik. Hal ini bertujuan agar mereka memperoleh karakter yang kuat dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Konsep ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat sebagai respons terhadap situasi aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Situasi ini ditandai dengan peningkatan tindakan kriminalitas, penurunan semangat nasionalisme, munculnya sikap rasisme, serta menurunnya toleransi beragama dan religiusitas dalam masyarakat. Hal ini memerlukan langkah-langkah untuk membangkitkan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang mulai terkikis, sehingga dapat dihidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa segera diambil adalah melakukan perbaikan terhadap kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, yang harus mengarah pada pendidikan karakter yang nyata. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah menegaskan pentingnya pendidikan karakter, namun implementasinya harus diperkuat. Hal ini tercermin dari tujuan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dalam setiap individu.

Selama ini, fokus utama dalam proses pembelajaran hanyalah pada kemampuan kognitif anak. Sehingga, aspek pendidikan karakter yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional jarang atau bahkan tidak pernah ditekankan sama sekali. Hal ini terlihat dari betapa dominannya hasil Ujian Nasional dibandingkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap semua mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pendidikan karakter tidak dapat direduksi menjadi sekadar materi yang dicatat dan dihafalkan, dan tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, pendidikan karakter melibatkan proses pembiasaan, keteladanan, dan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui semua aktivitas siswa di sekolah, dalam lingkungan masyarakat, maupun di rumah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua.

Evaluasi keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat dilakukan melalui tes formatif atau sumatif yang hanya menghasilkan skor. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan karakter diukur dari

terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter; berakhlak, berbudaya, santun, religius, kreatif, dan inovatif, yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu, tidak ada alat evaluasi yang secara langsung dapat menunjukkan keberhasilan pendidikan karakter. Konfigurasi karakter sebagai hasil dari proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam empat aspek utama: pengembangan spiritual dan emosional, pengembangan intelektual, pengembangan fisik dan kinestetik, serta pengembangan afektif dan kreativitas. Keempat aspek ini saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain secara holistik dan kohesif, yang bertujuan untuk membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Pendidikan karakter menjadi salah satu cara yang tepat untuk melakukan pembentukan karakter bagi generasi muda; generasi yang memiliki pengetahuan yang tinggi, didukung oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

D. METODE DAN PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter tidaklah merupakan suatu topik baru di dunia pendidikan. Sebenarnya, pendidikan moral telah ada sepanjang sejarah pendidikan itu sendiri. Sejak zaman dahulu, pendidikan di Indonesia telah mencakup unsur-unsur karakter. Salah satu tokoh pendiri bangsa, Bung Karno, bahkan menekankan bahwa pembangunan karakter harus menjadi prioritas utama dalam membangun bangsa ini, karena karakter yang baik akan membawa Indonesia menuju kemuliaan, kemajuan, dan kejayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, tanpa pembangunan karakter, bangsa ini akan mengalami kemunduran. Menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak, karakter adalah kombinasi yang kompatibel dari semua kebajikan yang diakui oleh tradisi agama, sastra, kearifan lokal, dan kebijaksanaan umum sepanjang sejarah.

Namun demikian, menurut Novak, tidak ada individu yang memiliki semua kebajikan tersebut, dan setiap individu memiliki kelemahan.

Lickona mengartikan pendidikan karakter sebagai upaya untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan moral, yang tercermin dalam perilaku nyata, seperti perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, bekerja keras, dan sebagainya. Menurut Lickona, komponen karakter yang baik meliputi pengetahuan moral (kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, perspektif moral, pengambilan keputusan moral, pengetahuan diri), perasaan moral (hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, kendali diri, kerendahan hati), dan tindakan moral (keterampilan, keinginan, kebiasaan).

Elkind & Sweet menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk membantu individu memahami dan memperhatikan nilai-nilai etis atau moral. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pembangunan karakter adalah usaha untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang memiliki moralitas, etika, budaya, dan adab yang sesuai dengan ajaran Pancasila, ini dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan kebangsaan saat ini, seperti kehilangan orientasi nilai-nilai Pancasila, keterbatasan kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penurunan kesadaran akan nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mencapai visi pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, moral, etis, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Pendidikan karakter secara esensial bertujuan untuk membentuk masyarakat yang kuat, kompetitif, memiliki moral yang luhur, bermoral, toleran, berjiwa gotong royong, memiliki semangat patriotik, dinamis dalam perkembangannya, berfokus pada ilmu

pengetahuan dan teknologi, semua didasarkan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsinya mencakup (1) mengembangkan potensi dasar agar individu memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, dan perilaku yang baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku yang mencerminkan keberagaman budaya dalam masyarakat; (3) meningkatkan kemajuan peradaban masyarakat yang kompetitif di tingkat global. Pendidikan karakter diimplementasikan melalui berbagai sarana seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, kelompok politik, pemerintah, sektor bisnis, dan media massa.

Pada level yang lebih umum, diharapkan bahwa pendidikan karakter akan menjadi bagian integral dari budaya di sekolah.

- **Pembentukan dan Pengembangan Potensi:** Pendidikan karakter memiliki tujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi individu atau warga Indonesia agar memiliki pemikiran yang baik, hati yang baik, dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- **Perbaikan dan Penguatan:** Pendidikan karakter bertujuan untuk memperbaiki karakter yang negatif pada individu dan warga Indonesia, serta memperkuat peran keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam partisipasi dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan potensi individu atau warga negara menuju bangsa yang berjiwa karakter, maju, mandiri, dan sejahtera.
- **Penyaringan:** Pendidikan karakter bangsa berperan dalam menyaring nilai-nilai budaya sendiri dan mengambil nilai-nilai positif dari budaya lain untuk membentuk karakter individu dan warga Indonesia agar dapat menjadi bangsa yang memiliki martabat yang tinggi.

Berikut berbagai macam pendekatan dalam Pendidikan karakter :

1. Pendekatan melalui keteladanan

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, unit-unit pendidikan formal dan nonformal perlu dipersiapkan sebagai

pendukung utama aktivitas tersebut dan harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan. Contoh keteladanan juga dapat diberikan melalui perilaku dan sikap para pendidik dan staf kependidikan dalam memberikan contoh tindakan yang positif, sehingga diharapkan mereka menjadi contoh yang baik bagi para siswa untuk menirunya.

2. Pendekatan melalui pembelajaran

Pembelajaran karakter diimplementasikan melalui beragam aktivitas, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan formal dan nonformal. Dalam ruang kelas, pembelajaran karakter terjadi melalui proses pembelajaran pada setiap materi pelajaran atau kegiatan yang secara khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Di lembaga pendidikan formal dan nonformal, pembelajaran karakter dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang diadakan oleh lembaga tersebut dan diikuti oleh semua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Di luar lingkungan lembaga pendidikan formal dan nonformal, pembelajaran karakter dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas lain yang diikuti oleh sebagian atau seluruh peserta didik. Kegiatan ini sudah direncanakan sejak awal tahun pelajaran atau program pembelajaran dan dimasukkan ke dalam kalender akademik.

3. Pendekatan melalui pemberdayaan dan pembudayaan

Pengembangan nilai atau karakter memiliki dua konteks yang berbeda, yaitu latar makro dan latar mikro. Latar makro berkaitan dengan skala nasional yang mencakup semua aspek perencanaan dan implementasi pengembangan nilai atau karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan nasional.

Secara umum, pengembangan karakter di tingkat makro dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Dalam tahap perencanaan, nilai-

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

A. KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nilai-nilai utama Pancasila dimulai dengan nilai Ketuhanan yang sangat terkait dengan dimensi religiusitas. Nilai ini mencakup prinsip-prinsip perilaku universal manusia yang meliputi semua aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Keterkaitannya dengan Tuhan mengatur bagaimana generasi milenial menjaga kebenaran spiritual mereka dengan tetap melaksanakan ibadah sesuai keyakinan agama mereka. Namun, terkadang, mereka dapat mengabaikan tanggung jawab keagamaan mereka karena terlalu terpaku pada penggunaan teknologi digital. Selain itu, dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, penting bagi generasi milenial untuk menjaga sikap terhadap sesama. Sayangnya, masih banyak dari mereka yang kurang memperhatikan etika terutama terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka dapat dihargai oleh orang lain jika mereka tidak mampu menghargai orang lain dengan menjaga perilaku, perkataan, dan sikap mereka di zaman ini.

Setiap individu memiliki karakter yang tercermin dalam nilai-nilai setiap butir Pancasila, yang bersumber dari hati nurani dan pola pikir manusia. Karakter yang berasal dari hati nurani termasuk kejujuran, iman, ketakwaan, keadilan, keteraturan, keamanan, ketaatan, tanggung jawab, empati, keberanian mengambil risiko, dan semangat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., (2019). Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. 8 (2). 123-138.
- Abna Hidayati. (2014). *Buku Teks Desain Kurikulum Pendidikan Karakter*. Universitas Negeri Padang.
- Anderson, L. (2018). The Impact of Technology on Character Education. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 1(1), 1-6.
- Andi Atma. (2019). Pengembangan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter. *Bada'a Jurnal Pendidikan Dasar*. 1(1). 31-43.
- Anna, H., Dkk., (2022). Penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Kehidupan Sosial Siswa Kelas X SMK Swasta Harapan Pokenjior. *Jurnal Kewarganegaraan*. 1(2). 133-138.
- Annisa, M., Dkk. (2022). Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 5(7). 2060-2069.
- Ariefa, E., (2002). *Pendidikan Moral Generasi Muda di Era Global*. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. 1 (9). 31-56.
- Anwar Rube'i, Muh., (2018). Implementasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2). 61-71.
- Belferik, M., (2013). Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Karakter*. 4(1). 1-14.
- Chen, S. (2018). The Role of Technology in Character Education. [online] Available at: <https://www.edtechreview.in/news/6409-the-role-of-technology-in-character-education> [Accessed: 4 Feb 2023]

- Elsa, S.H., Dkk., (2023). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Keluarga. *Advances In Social Humanities Research*. 1(5). 532-537.
- Endang Komara. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Sipatahoenan*. 4(1). 17-26.
- Faizah Nailly. (2023). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. 9(3). 1525-1533.
- Hondi, P., (2014). *Pentingnya Menghargai Orang Lain*. *Jurnal Humaniora Binus*. 5 (1). 88-95.
- Ilham, M., Dkk, (2021). Runtuhnya Nilai Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajalelanya Hoax. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 5(3).
- Jaelani, A., Dkk. (2020). Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran di Sekolah. *International Journal Of Educational Resources*. 1(2). 75-89.
- Mujiatun, (2019). Pembentukan Karakter Pancasila Melalui Pendidikan Islam. *Jurnal : Jurnal Muftadiin*, 2(2).
- Novi Trilisiana. (2023). Pendidikan Karakter. Kediri: CV Selembar Karya Pustaka.
- Onny Cahyandi,. Dkk, (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke 2 Pelajaran PPKn SMK PGRI 3 Tulungagung. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1(6).
- Palupi, R., (2016). Menumbuhkan Sikap Toleran Pada Anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Riyana, H., M., Yuliani, R., & Ota, R., (2013). Nilai Moral Dalam Ehon Guri To Gurano Kaisuiyoku Karya Nakagawa Rieko. *Jurnal Japanesse Literature*. 2 (1). 1-9.
- Rizal Ristantomo. (2022). Pembentukan Karakter Berdasarkan Pancasila di Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Paidea: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*. 2(2). 55-59.

- Suastika., Dkk., (2022). Strategi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Banyumas : CV. ZT Corpora.
- Sudiati. (2009). Pendidikan Moral Ditinjau Dari Perspektif Global. *Cakrawala Pendidikan UNY*. 1 (2). 209-221.
- Supriyono., Dkk., (2015). Pendidikan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tatik., A. Djohni., D. (2018). Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Akhlak Baik Pada Anak Usia Dini. Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas. 152-158.
- Tedi Priatna. (2018). Membangun Karakter Bangsa. Bandung : CV Insan Mandiri.
- Tukiran., Eko, P., (2021). Pengembangan Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Guru Guru SD Kepada Peserta Didik. Semnas LPPM-Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Tutuk Ningsih. (2021). Pendidikan Karakter : Teori & Praktik. CV Rumah Kreatif Wadas Kelir. Banyumas.
- Uswatun., K., (2016). Model Model Pendidikan Karakter di Sekolah. *Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 7(1).
- Yuni., H, (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. *Paradigma : Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*. 18(1). 20-27.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-526-8 (PDF)



9 786231 475268